

SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

(Suatu Studi di wilayah Hukum Polres Pulau Buru tahun 2008-2012)

Oleh

AMRULLAH UMASUGI MARA

B 111 07 885

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN**

(Suatu Studi di wilayah Hukum Polres Pulau Buru tahun 2008-2012)

Oleh

**AMRULLAH UMASUGI MARA
B 111 07 885**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

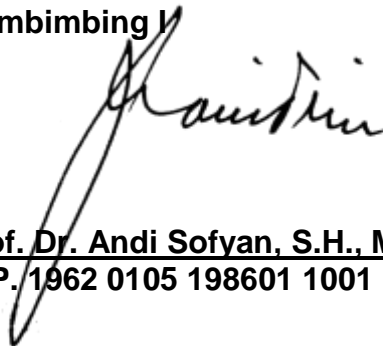
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : AMRULLAH UMASUGI MARA
Nomor Induk : B111 07 885
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Studi
Di Wilayah Polres Pulau Buru Tahun 2008-2012)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, April 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 1962 0105 198601 1001

Pembimbing II



Hijrah Adhyanti, S.H., M.H.
NIP. 1979 0326 200812 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : AMRULLAH UMASUGI MARA
NomorInduk : B111 07 885
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Studi
Di Wilayah Polres Pulau Buru Tahun 2008-2012)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebaga ujian akhir
program studi.

Makassar, April 2013

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H
NIP. 1980 0702 006041 001

ABSTRAK

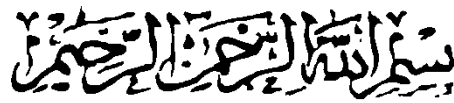
AMRULLAH UMASUGI MARA (B111 07 885), *Tinjauan Kriminologis terhadap Pencurian dengan Pemberatan (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru)* (dibimbing oleh Andi Sofyan dan Hijrah Adhyanti)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pencurian dengan pemberatan dan upaya aparat kepolisian Polres Pulau Buru dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Pulau Buru.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Pulau Buru Propinsi Maluku. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan juga pertanyaan dikembangkan di depan narasumber serta dilakukan telaah dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Pulau Buru yaitu faktor ekonomi, pendidikan yang rendah dan kelalaian masyarakat. Upaya pihak kepolisian Polres Pulau Buru dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Pulau Buru berupa deteksi dini dilakukan dengan melakukan pemetaan daerah rawan sehingga kejahatan pencurian dengan pemberatan bisa ditanggulangi lebih awal, upaya pre-emptif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan, upaya preventif dilakukan dengan mengadakan patroli dan ronda malam dan upaya represif dilakukan dengan melakukan tindakan Kepolisian yakni penangkapan, penahanan dan pelimpahan kasus ke Kejaksaan (P-21).

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua Penulis yaitu Ayahanda Drs.H. Ahmad Jawa, M.M. dan Ibunda Syamsima Andi Soi, S.H., yang dengan keringat dan air mata mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh perjuangan dan kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini pula Penulis ingin menyampaikan Terima Kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik.

4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S dan Ibu Nur Asisa, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian dan Sekertaris Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., dan Hijrah Adhyanti, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ismail Alrip, S.H.,M.H. selaku penasihat akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik Penulis selama menuntut ilmu di bangku kuliah.
8. Seluruh Pegawai Akademik dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani urusan Administratif dan Akademik Penulis selama kuliah.
9. Bapak AKP. Muhammad Harris, S.H., S.Ik., selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, terkhusus Brigpol Kamaruddin Sangaji yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulisan skripsi ini.
10. Saudara-saudariku : Nurhidaya Jawa, S.sos, Saiful Ahmad Umasugi Jawa, S.T., Ira Lestari Putri Ahmad, Mira Lestari Putri Ahmad, M. Faisal Hayoto dan Novi Manggasa, S.E., yang telah memberikan semangat, motivasi, serta dukungan moril maupun materil selama Penulis duduk di bangku kuliah hingga menyelesaikan Studi.
11. Sahabat-sahabatku Briptu. Riyan Fahrul Amhad S.H., Jawadil S.H., Ilham Akbar Ilyas S.H., Hermansyah S.H., Rahmat S.H., Andi Sarwo Edi Haruna S.H., dani S.H., Mandaliest S.H., Koang S.H., Abhi S.H.,

Iwan S.H., Fikar S.H., Andi Aso S.H., Ishak S.H., Syahril S.H., Imam S.H., Ame S.H., Mizwar Malawat S.H., Hestiana Masuku S.H., Wiriawan Batara S.H., Ardi Iting S.H., Usfan S.H., Undru S.H., Bang Pute S.H., Zul S.H., Sri Wahyuni S.H., Aming, Indra Nanda, Ode S.H., Jeki S.H., Mitha S.H., Joko S.H, Franky Aris S.H., Echy S.H., Yulianti S.H., thanks telah berbagi tangis dan tawa dengan Penulis. Semoga persahabatan kita ABADI.

12. Teman-teman KKN Reguler Gel. 80 Kecamatan Sinjai Timur yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Kepala Desa serta Ibu dan teman-teman Posko Desa Sanjai, Iccad, Rakhmat, Idha, Kusdiana Wati terima kasih atas bantuan dan kerja sama selama melakukan KKN di Desa Sanjai.
14. Kepada teman-teman UKM Sepak Bola FH-UH. M. Rahman S.H., Andi Firdaus Samad S.H., M. Fuad Nasir, Samsuriadi S.H., Fandi Eksepsi, Alim Bahri S.H, Jamsir, boim, Andi Dede Suhendra, Hadi, Yulianti, Nurmi, Ruri, Imam, Chairul Ramadhan, Adjad Sudrajat, Afandi Haris, Ramadhana, Akhwani, Abdi, Avil, Fandi, Amir Johart, Qasmen, Dayat, Ali, Kanda Ruda Ilbaya S.H, kanda Abd. Rasyid S.H, Andry S.H., terkhusus Kanda Muhammad Basit S.H. dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Banyak hal-hal positif yang penulis dapatkan dari kalian.
15. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kesadaran penuh, skripsi yang tentunya terdapat begitu banyak kekurangan, namun penulis sangat berharap skripsi ini mempunyai manfaat bagi masyarakat khususnya bagi penegakan hukum. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf. semoga yang telah membantu mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalam

Makassar, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN USULAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi	10
B. Pengertian-Pengertian	15
1. Kejahatan	15
2. Kejahatan Pencurian (Pasal 362 KUHPidana)	18
3. Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHPidana	21
C. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis	26
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Maros	36
B. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam meminimalisir tindak pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Maros	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 Data kejahatan yang menonjol di wilayah Hukum Polres Maros 2006-2010.....	37
TABEL 2 Data kejahatan pencurian di wilayah Hukum Polres Maros 2006-2010.....	38
TABEL 3 Data Penyelesaian kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan 2006-2010	39
TABEL 4 Data pelaku Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Maros menurut pekerjaan 2006-2010.....	40
TABEL 5 Data pelaku Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Maros menurut pendidikan 2006-2010	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, yang dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat saat ini seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materiil Indonesia, yang memuat asas–asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Larangan–larangan dan perintah tersebut telah dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHPidana, berupa rumusan tentang perbuatan – perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan tersebut merupakan ciri khas yang membedakannya dengan peraturan perundang–undangan lainnya yang bukan pidana.

Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah "*modus operandi*" (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:²

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara "informal" diperlihatkan oleh warga masyarakat.

² Mulyana W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, hlm. 4.

Persepsi masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa penyebab terjadinya suatu kejahatan berasal dari faktor pelaku saja. Menurut Arif Gosita,³ kriminologi konvensional lebih banyak mencari sebab musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tidak atau kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan. Ketidaksinambungan pengamatan ini kurang menguntungkan usaha penanggulangan kejahatan, sebab untuk maksud itu harus pula diperhatikan dan dipahami pihak-pihak korban kejahatan. Pada kenyataannya, pihak korban pun dapat ikut secara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa kejahatan, bahkan menjadi pelaku aktif, atau bekerjasama dengan pelaku utama.

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Seperti dapat dilihat pada kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi.

Selanjutnya pada kejahatan umum, juga kita dapatkan beraneka ragam atau macamnya, dimana salah satunya adalah kejahatan pencurian. Poerwadarminta, menjelaskan sebagai berikut :⁴

“Pencuri berasal dari kata dasar curi; yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara

³ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buana Ilmu Populer, hlm. 7.

⁴ W.J.S Poerwadarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

(perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah)”.

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHPidana ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 KUHPidana, dimasukkan ke dalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya.

Wilayah Kabupaten Buru di Provinsi Maluku merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan dan mempunyai potensi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, seperti peternakan sapi, kerbau, kuda dan kambing. Namun seiring dengan perkembangan waktu, wilayah Kabupaten Buru telah terjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan kejahatan yang sering dijumpai yaitu pencurian hewan ternak, pencurian motor dengan modus merusak kunci motor atau menggunakan kunci palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terjadi pada malam hari.

Kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan pencurian dengan pemberatan. Pencurian tersebut merupakan pencurian yang terjadi dalam keadaan tertentu atau cara-cara tertentu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkat dalam suatu penelitian, dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan (Suatu Studi Di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru)”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah, adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Kepolisian Resor (selanjutnya disebut Polres) Pulau Buru?
2. Upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Pulau Buru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Pulau Buru.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Pulau Buru.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan bahan referensi atau sebagai acuan dalam memahami atau menyelesaikan yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan.
2. Sebagai sumbangan literatur tambahan bagi para akademisi yang ingin mendalami lebih jauh tentang hukum pidana khususnya pencurian dengan pemberatan.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi para penegak hukum di Indonesia, khususnya dari segi pencegahan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi.

Sebagai suatu bidang ilmu, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁵

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁶ Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal.

⁵ A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 15.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal.

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal.

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikiatri dan Neuropatologi Kriminal.

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi.

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Di samping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :

1. Higiene Kriminal.

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal.

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuan sanksi.

3. Kriminalistik (*policie scientifique*).

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).⁷

Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu:

⁷ Ibid., hlm. 10.

1. Sosiologi Hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. *Penology*.

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.⁸

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland.⁹ Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi ada dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat,

⁸ Ibid., hlm. 11.

⁹ Ibid., hlm. 11.

lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁰

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹¹

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.¹²

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹³

Jadi objek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
2. Pelaku kejahatan; dan

¹⁰ Ibid., hlm. 12.

¹¹ Ibid., hlm. 12.

¹² Ibid., hlm. 12.

¹³ Ibid., hlm. 12.

3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat

B. Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah “tindak pidana” atau *strafbaar feit*, sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHPidana. Istilah tindak pidana di sebut dalam bahasa asing yaitu “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “*subjek*” tindak pidana.¹⁴

Selain istilah *strafbaar feit*, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*”. Dalam bahasa Jerman disebut “*delict*”, dalam bahasa Prancis disebut “*Delit*” dan dalam Bahasa Indonesia dipakai Delik.

Menurut van Bemmelen, istilah *strafbaar feit* itu sendiri berasal dari Bahasa Belanda, *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum,

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

sehingga secara harfiah istilah *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁵

Karni mengemukakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan. Sementara Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹⁶

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”.¹⁷

J. Baumen mengemukakan *Verbrechen im waieren, allgemeinen sinne* adalah “*die tatbestandmaszige rechwidrige und schuld-hafte handlung*” (perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).

Menurut H.R Abdussalam, tindak pidana adalah “perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit*, hlm. 55

¹⁷ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana”.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁹

Menurut D. Simons, tindak pidana adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”.²⁰

Pompe memandang tindak pidana yaitu dari 2 (dua) segi, yaitu :²¹

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dalam buku pengantar hukum Indonesia, tindak pidana biasa juga disebut peristiwa pidana yang berarti suatu kejadian yang mengandung

¹⁸ Abdussalam, 2006, Prospek Hukum Pidana Indonesia, Restu Agung, Jakarta, hlm. 3.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 7.

²⁰ Abdussalam, Op. cit, hlm 4.

²¹ P.A.F Lamintang, Op. cit, hlm. 183.

unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²²

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai tindak pidana diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perilaku yang mana dilarang oleh Undang-undang diancam dengan sanksi pidana. Dengan syarat umum yaitu adanya sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Apabila dilihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno, maka unsur-unsurnya ialah:²³

- a. Unsur-unsur formil:
 - 1) Perbuatan (manusia);
 - 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
 - 3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
 - 4) Larangan itu dilanggar oleh manusia.
- b. Unsur-unsur Materil:
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan undang-undang, tetapi tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

²² Tiena Yulies Masriani, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 62.

²³ Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Indonesia, PT. Rineka cipta, Jakarta, hlm 54.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur objektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar sisi si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi:²⁴

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia.
Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh (Pasal 338 KUHPidana) dan lain-lain. Ada pula perbuatan atau kelakuan manusia yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melapor kepada pihak yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada sesuatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu (Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidana).
- 2) Akibat yang menjadikan syarat mutlak dari delik.
Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang merumuskan secara materil, misalnya: pembunuhan (Pasal 335 KUHPidana), penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana) dan lain-lain.
- 3) Unsur melawan hukum.
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHPidana tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHPidana), untuk memilikinya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHPidana) dan lain-lain.
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.

²⁴ P.A.F. Lamintang, Op. cit, hlm. 184

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: pengasutan (Pasal 160 KUHPidana), melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHPidana) dan lain-lain. Tindak pidana harus dilakukan di depan umum. Selain daripada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana) harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHPidana). Unsur-unsur tersebut diatas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

5) Unsur yang memberatkan pidana.

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama 8 tahun—ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun—ayat (2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun—ayat (3).

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Hal ini misalnya dengan suka rela masuk tentara Negara asing, yang diketahuinya bahwa Negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHPidana) dan tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu dilakukan (Pasal 164 KUHPidana). Unsur-unsur tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang (Pasal 164 dan 165 KUHPidana). Unsur tambahan tersebut harus dibedakan dengan “syarat-syarat tambahan yang menentukan dapat dituntut”, seperti “pengaduan” dalam delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHPidana), perbuatan cabul (Pasal 293 KUHPidana) dan lain-lain.

Delik aduan tersebut tidak dapat dituntut apabila, kalau tidak diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Apabila jaksa menuntutnya pula meskipun tanpa adanya pengaduan, maka tuntutan jaksa akan ditolak oleh hakim, penolakan itu merupakan ketetapan (*beschikking*). Tambahan itu tidak dimuat dalam surat dakwaan, maka keputusan hakim adalah “lepas dari segala tuntutan hukum” (Pasal 191 KUHPidana). Sedangkan apabila unsur

tambahan itu dimuat dalam surat dakwaan, tetapi dalam sidang tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memutus “bebas dari segala tuduhan” (Pasal 191 ayat(1) KUHpidana).

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana.

Unsur subjektif ini meliputi:

1) Kesengajaan (*dolus*).

Hal ini terdapat, seperti dalam; melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHpidana), pembunuhan (Pasal 338 KUHpidana), dan lain-lain.

2) Kealpaan (*culpa*).

Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan (Pasal 334 KUHpidana), menyebabkan mati (Pasal 359 KUHpidana) dan lain-lain.

3) Niat (*voornemen*).

Hal ini terdapat dalam percobaan(*poging*) – Pasal 53 KUHpidana.

4) Maksud .

Hal ini terdapat seperti dalam pencurian (Pasal 362 KUHpidana), penipuan (Pasal 372 KUHpidana) dan lain-lain.

5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*).

Hal ini terdapat seperti dalam pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHpidana).

6) Perasaan takut (vrees)

Hal ini terdapat seperti dalam; membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHPidana), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHPidana) dan lain-lain.

Namun demikian dengan tidak adanya keseragaman pandangan dan definisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistik tentang uraian delik, maka unsur-unsur suatu delik pada umumnya sebagai berikut:²⁵

1. Perbuatan aktif atau pasif,
2. Akibat (hanya pada delik materil),
3. Melawan hukum formil dan materil,
4. keadaan menyusul atau keadaan tambahan,
5. keadaan yang secara objektif yang memperbaiki pidana,
6. tidak adanya dasar pembenar dan pemaaf.

C. Pengertian–Pengertian.

1. Kejahatan.

KUHPidana membedakan antara kejahatan (delik hukum) dengan pelanggaran (delik undang-undang). Pembagian ini sangat penting karena mendasari seluruh sistem pidana Indonesia sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilahan tersebut juga dibuat berdasarkan

²⁵ :<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2107131-unsur-unsur-tindak-pidana/#ixzz1bm6PnREf>

tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam perbedaan sanksi pidana dan cara atau proses peradilannya.

Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.²⁶

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga diperhatikan rumusan Arif Gosita,²⁷ mengenai pengertian kejahatan, yaitu suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Terlepas dari pendapat tersebut yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian :

- a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis.

²⁶ Topo Santoso, *Op. cit*, hlm. 14.

²⁷ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88.

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHPidana). Dalam KUHPidana sendiri tidak ditentukan pengertian kejahatan, namun dapat diartikan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana.

b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).

c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi.

Secara kriminologis, kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

2. Kejahatan pencurian.

Kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang menentukan:

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Dalam penjelasan KUHPidana menurut R. Soesilo pencurian biasa mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²⁸

- a. Perbuatan “mengambil”.
Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan.(Pasal 372 KUHPidana).
Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah *pindah* tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.
- b. Diambil harus sesuatu barang.
“sesuatu barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
“Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
“Sebagian kepunyaan orang lain” misalnya, A bersama B membeli sebuah sepeda., maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan Hukum (melawan hak).
“Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian

²⁸ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, hal. 249.

diambilnya. Bila waktu pengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi. Akan tetapi serentak datang di rumah barang itu untuk dimiliki diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya “sudah berada di tangannya”.

Menurut Andi Hamzah, delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, yang disebut delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara.²⁹ Bagian inti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

- a. Mengambil suatu barang (*enig goed*),
- b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- c. Dengan maksud untuk memilikinya secara,
- d. Melawan hukum.

Semua bagian inti ini harus disebut dan dijelaskan dalam dakwaan bagaimana dilakukan. Koster Henke (menyatakan bahwa W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.³⁰ Menurut Cleiren, mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki. Jika seseorang yang mengambil barang ternyata miliknya sendiri (contoh, A mencuri baju di tukang jahit yang ternyata bajunya sendiri, maksudnya hanya tidak mau bayar upah jahit) maka bukan delik pencurian.³¹ Selanjutnya Koster Henke menjelaskan, jika misalnya seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara digadaikan, maka bukan delik pencurian.³²

Lain halnya KUHPidana Jepang, pencurian milik sendiri dianggap milik orang lain jika barang itu dikuasai oleh orang lain atau di bawah

²⁹ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, hlm. 100.

³⁰ Ibid., hlm. 102.

³¹ Ibid., hlm. 102.

³² Ibid., hlm. 102.

pengawasan orang lain sesuai dengan perintah pejabat publik. Jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian.

3. Kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Kejahatan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana Penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - 1e. Pencurian hewan.
 - 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
 - 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ, tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
 - 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 5e. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) jika pencurian yang diterangkan dalam no. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam no. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.³³

Menurut R. Soesilo dalam penjelasannya yakni : ³⁴

1. “Pencurian dengan pemberatan” atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. “Pencurian dengan pemberatan” itu ialah pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :
 - a. Bila barang yang dicuri itu adalah hewan dan yang dimaksudkan dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101, yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian

³³ R. Soesilo, *Op. cit*, hlm.250.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 251.

hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.

- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang tidak terjaga, sedangkan orang-orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian harus ada hubungannya, artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk di sini misalnya seorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota ada terjadi kebakaran, karena di sini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.
- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah “gedung” atau “toko” yang tidak didiami siang-malam, tidak masuk pengertian “rumah”. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini.
- d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk di sini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55). Bukan yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56).
- e. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya. Membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar. Memecah yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya. Memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk

tempat orang lalui, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Kunci palsu yaitu perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Pakai jabatan palsu yaitu costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu.

2. Dalam Pasal 363 sub 5 dikatakan :

- a. Si tersalah masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar dan sebagainya yaitu ini berarti bahwa pembongkaran itu untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu yang punya rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari persembunyiannya mengambil barang-barang dalam rumah itu, dan untuk dapat keluar dari rumah tersebut membongkar pintu rumah, maka peristiwa itu tidak masuk dalam golongan ini, oleh karena pembongkaran itu untuk keluar dan bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan.
- b. Si tersalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya. Mencapai artinya memasukkan ke dalam kekuasaannya. Misalnya seorang mencopet uang di dalam saku baju, dengan menggunting saku itu atau pencuri uang dalam lemari atau peti besi di dalam rumah dengan merusak lemari atau peti tersebut. Akan tetapi menurut *Arrest Hoge Raad* 27 Januari 1896, mencopet arloji dengan menarik rantar arloji itu sampai putus atau mencuri hewan dengan memotong tali ikatan hewan itu, tidak masuk membongkar atau memecah.

D. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis.

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu ³⁵

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).
2. *Cultural deviance* (peyimpangan budaya).
3. *Social control* (kontrol sosial).

³⁵ A. S. Alam, *Op. cit*, hlm. 45.

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

1. Teori-teori *anomie*.

a. Emile Durkheim.

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, dilihat pada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana berfungsinya.

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah, Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.

Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

b. Robert Merton.

Konsepsi Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Menekankan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu :

- 1) *Cultural aspiration* atau *cultural goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan;
- 2) *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu.

Dalam masyarakat menurut pandangan Merton, telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh

seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui *legitimated means* (mematuhi hukum). Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimated means*). Pada umumnya, mereka yang melakukan *illegitimated means* tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.

2. Teori-teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theories*).

Teori penyimpangan budaya memfokuskan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah :

- a. *Social disorganization;*
- b. *Differential association;*
- c. *Cultural conflict.*

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

Differential association theory yang dicetus oleh Sutherland bermakna bahwa pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

Cultural conflict theory, menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri yaitu kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup, sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*). Konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat *conduct norms*-nya sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat *homogeny* atau sederhana menjadi masyarakat yang kompleks di mana sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal.

3. Teori kontrol sosial (*Control social theory*).

Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia.

Sementara teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Travis Hirschi telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds* (ikatan sosial). Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa sosial bonds meliputi empat unsur yaitu :

- a. *Attachment* (keterikatan) adalah keterikatan seseorang pada (orang tua), sekolah atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.
- b. *Involvement* (keterlibatan) bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing) dan lain-lain. Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan.
- c. *Commitment* (pendirian kuat yang positif) bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk

pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya.

- d. *Belief* (pandangan nilai moral yang tinggi) merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Penanggulangan kejahatan Emperik terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu : ³⁶

1. Pre-Emtif.

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif.

³⁶ Ibid., hlm. 79.

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif .

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

Peneliti akan mengadakan penelitian di wilayah Hukum Polres Pulau Buru Provinsi Maluku dan beberapa jajarannya. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan relevan dengan judul skripsi.

B. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, data didapat dari berbagai peraturan perundang-undangan, wawancara dan hasil pengamatan.

2. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sumber lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yakni melalui data sekunder (*library research*) dan data primer (*field research*).

1. Studi pustaka (*library research*).

Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Studi lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan instansi–instansi dan informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat *interview*, objek wawancara menjawab dengan bebas, tujuannya untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat–pendapat mereka.

D. Analisis Data.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru

Kabupaten Buru yang berada di Provinsi Maluku terletak antara 2°25' lintang selatan dan 3°83' lintang selatan dan antara 126°08' bujur timur dan 127°20' bujur timur. Kabupaten Buru dibatasi oleh Laut Seram di sebelah utara, Kabupaten Buru Selatan di sebelah selatan, Laut Seram di sebelah barat dan Selat Manipa di sebelah timur. Keberadaannya di antara 3 kota penting di Indonesia Timur (Makassar, Manado/Bitung dan Ambon). Dan di lalui Sea Line III telah menempatkan Kabupaten Buru pada posisi strategis.

Kabupaten Buru mempunyai luas daerah 7. 911, 88 Km² yang meliputi 10 Kecamatan, 82 Desa, memiliki transportasi khususnya dari Pulau Buru menuju beberapa kota Kabupaten lain dengan menggunakan transportasi darat maupun transportasi laut. Jumlah Penduduk Kabupaten Buru sebanyak 323.064 Jiwa (Laki-laki=150.925 jiwa dan perempuan=172.135 jiwa), terdiri dari beberapa suku daerah dan mayoritas beragama Islam. Mata pencaharian penduduk mayoritas petani, nelayan, peternak dan pedagang.³⁷

Polres Buru mempunyai 10 Kepolisian Sektor (selanjutnya disebut Polsek) yaitu Polsek Namlea, Polsek Waeapo, Polsek Waplau, Polsek Air

³⁷ Badan statistic Kabupaten Buru

Buaya, Polsek Waisama, Polsek Batabual, Polsek Kepala Madan, Polsek Namrole, Polsek Leksula dan Polsek Ambalau.

Untuk mengetahui tingkat kriminalitas di wilayah hukum Polres Buru, berikut penulis uraikan data 5 jenis kejahatan yang paling dominan terurai dalam table 1 berikut ini :

Tabel 1 Data Kejahatan yang Menonjol di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru, Tahun 2008 sampai Tahun 2012

No	Tahun	Curi	Penggelapan	Penipuan	Pengrusakan	Aniaya
1	2008	15	2	6	3	19
2	2009	24	7	6	3	40
3	2010	24	9	8	2	13
4	2011	25	2	7	3	19
5	2012	37	-	1	3	16
Jumlah		125	20	28	14	107
Total		294				

Sumber : Polres Pulau Buru 2013

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kelima kejahatan yakni pencurian, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penganiayaan termasuk dalam kejahatan yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polres Pulau Buru. Total kejahatan yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polres Pulau Buru selama 5 tahun terakhir (2008-2012) sebanyak 294 kasus, 41% adalah kejahatan pencurian dengan jumlah 125 kasus, sisanya 57,48% adalah kejahatan penggelapan, penipuan, pengrusakan dan aniaya dengan jumlah 169 kasus.

Selanjutnya, penulis uraikan data jenis-jenis kejahatan pencurian di wilayah hukum Polres Buru sebagaimana terurai pada table 2 berikut ini:

Tabel 2 Data Kejahatan Pencurian di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru, Tahun 2008 sampai Tahun 2012

No	Tahun	Curas	Curat	Curi Biasa	Curi dalam Keluarga
1	2008	-	11	4	-
2	2009	-	18	6	-
3	2010	-	15	9	1
4	2011	1	12	14	2
5	2012	4	19	9	-
Jumlah		5	75	42	3

Sumber : Polres Pulau Buru 2013

Keterangan:

Curas = Pencurian dengan kekerasan

Curat = Pencurian dengan Pemberatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan menempati kejahatan yang paling sering terjadi diantara jenis pencurian lainnya. Pencurian dengan pemberatan dengan jumlah 75 kasus atau 60%, pencurian dengan kekerasan dengan jumlah 5 kasus atau 4%, pencurian biasa dengan jumlah 42 kasus atau 33,6% dan pencurian dalam keluarga dengan jumlah 3 atau 2,4%

Dengan berdasar pada data di atas (tabel 2), Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pencurian dengan pemberatan dari tahun ke tahun khususnya tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Pulau Buru.

Perkara pencurian yang diproses di wilayah hukum Polres Pulau Buru tidak semuanya dilimpahkan ke Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 Data Penyelesaian Kasus Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan, Tahun 2008 sampai Tahun 2012

No	Tahun	Curat	
		Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus (P21)
1	2008	7	3
2	2009	11	5
3	2010	16	9
4	2011	19	8
5	2012	9	3
Jumlah		62	28

Sumber : Polres Pulau Buru 2013

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Pulau Buru mengalami peningkatan namun dalam hal penyelesaian kasus terjadi perkembangan yang tak menentu bahkan terjadi penurunan jumlah penyelesaian kasus. Dengan jumlah kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 62 kasus dan hanya 28 kasus yang diselesaikan (dilimpahkan ke Kejaksaan) atau 31,11%, sisanya masih ada 68,89% yang belum diselesaikan (dilimpahkan). Berkas tersebut tidak dilimpahkan karena tidak cukup bukti.

Selanjutnya Penulis menguraikan mengenai data pelaku pencurian di wilayah Hukum Polres Buru. Berdasarkan pekerjaannya, data pelaku pencurian dengan pemberatan terurai pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Data pelaku Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru menurut pekerjaan, Tahun 2008 sampai Tahun 2012

No	Tahun	Pekerjaan			Jumlah
		Tidak Bekerja (pengangguran)	Petani	Wiraswasta	
1	2008	5	1	1	7
2	2009	7	3	1	11
3	2010	11	5	-	16
4	2011	12	5	2	19
5	2012	5	3	1	9
Jumlah		40	17	5	62

Sumber : Polres Pulau Buru 2013

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa yang paling banyak melakukan pencurian dengan pemberatan adalah tidak bekerja (pengangguran). Dengan jumlah pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh golongan tidak bekerja (pengangguran) sebanyak 40 orang atau 83,91%, Jumlah pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh golongan petani sebanyak 17 orang atau 15,38% dan jumlah pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh golongan wiraswasta sebanyak 5 orang atau 0,71%.

Sementara data pelaku pencurian dengan pemberatan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini!

Tabel 5 Data pelaku Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru menurut pendidikan, Tahun 2008 sampai Tahun 2012

No	Tahun	Pendidikan					Jumlah
		Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
1	2008	5	1	1	-	-	7
2	2009	6	2	2	1	-	11
3	2010	10	3	2	1	-	16
4	2011	8	6	1	3	1	19
5	2012	3	3	2	1	-	9
Jumlah		32	15	8	6	-	62

Sumber : Polres Pulau Buru 2013

Berdasarkan tabel di atas, pencurian diketahui bahwa yang paling banyak melakukan pencurian dengan pemberatan adalah pelaku yang tidak bersekolah. Jumlah pelaku pencurian dengan pemberatan yang tidak sekolah sebanyak 32 orang atau 40,20%, jumlah pelaku pencurian dengan pemberatan yang berijazah SD sebanyak 15 orang atau 41,25%, jumlah pelaku pencurian dengan pemberatan yang berijazah SMP sebanyak 8 orang atau 12,58%, jumlah pelaku pencurian dengan pemberatan yang berijazah SMA sebanyak 6 orang atau 4,90% dan jumlah pelaku pencurian dengan pemberatan yang berijazah S1 sebanyak 1 orang atau 1,07%.

Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan, Penulis melakukan pengamatan dan wawancara terhadap tersangka dan aparat Kepolisian di Polres Pulau Buru. Bahwa faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi.

Berdasarkan pengamatan, memperlihatkan bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam hal ini khususnya adalah kemiskinan dan pengangguran.

Kemiskinan pada dasarnya juga dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru disebabkan oleh kebutuhan hidup yang semakin hari semakin kompleks atau beragam sedangkan tiap individu/masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan wajar, maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah melakukan jalan pintas atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya khususnya norma hukum, salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Demikian pula faktor ekonomi dalam bentuk pengangguran pada dasarnya dapat pula memicu terjadinya kejahatan pencurian khususnya

kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) cenderung selalu menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan termasuk kejahatan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan pencurian khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Menurut AKP. Muhammad Harris, S.H., S.Ik. selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, pencurian dengan pemberatan (wawancara, 11 Februari 2013) mengatakan bahwa :

Pada umumnya pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Mereka bermaksud untuk memenuhi kebutuhannya dengan mudah, dan ingin hidup berfoya-foya.

Jadi disini faktor ekonomi mempunyai hubungan erat dengan status pekerjaan. Dengan pekerjaan yang tidak menentu rasanya sulit untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi jika para pelaku kejahatan tersebut sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara melakukan suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

2. Pendidikan yang Rendah.

Selain faktor ekonomi seperti yang penulis uraikan bisa kita liat juga data pada tabel 5 di atas, bahwa faktor pendidikan juga menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Faktor pendidikan sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan

pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.

Penulis mencantumkan pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru, karena pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam mendidik seseorang. Tanpa pendidikan dan pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.

Peranan pendidikan agama dan pendidikan hukum adalah sangat penting dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan agama dan hukum yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya lingkungan sosial yang sehat.

Berdasarkan wawancara (12 Februari 2013) dengan salah satu Penyidik Reskrim Polres Pulau Buru Brigpol Kamaruddin Sangaji, beliau mengatakan bahwa pelaku kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Buru rata-rata pelakunya tidak berpendidikan, adapun tingkat pendidikan hanya SD dan SMP, karena itulah faktor pendidikan merupakan faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru. Beliau juga

menegaskan bahwa perlunya pendidikan yang cukup bagi seseorang agar orang tersebut dapat memahami apa konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukannya.

3. Masyarakat yang Lalai.

Selain kedua faktor tersebut di atas, faktor masyarakat yang lalai juga dapat menjadi suatu penyebab atau yang melatarbelakangi dari timbulnya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang sering terjadi di Kabupaten Buru.

Berdasarkan wawancara (11 Februari 2013) dengan AKP. Muhammad Harris, S.H., S.Ik. selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, menegaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Buru yaitu faktor masyarakat yang lalai. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang berhati-hati sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan. Dari kelalaian masyarakat tersebut timbulah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru.

B. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Meminimalisir Terjadinya Tindak Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pencurian dengan pemberatan sangat meresahkan masyarakat khususnya di Kabupaten Buru, untuk itu pihak Kepolisian di Polres Pulau

Buru telah mengadakan upaya penanggulangan untuk meminimalisir jumlah pencurian dengan pemberatan.

Adapun upaya penanggulangan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Polres Pulau Buru yakni *early warning* (deteksi dini), Pre-emptif, Preventif dan Represif.

Untuk memperjelas maka penulis menguraikan sebagai berikut :

a. Deteksi Dini (*early warning*)

Upaya penanggulangan ini dimaksud untuk mendeteksi daerah-daerah yang rawan pencurian dengan pemberatan seperti Kecamatan Namlea, Kecamatan Waeapo, Kecamatan Waplau, Kecamatan Air Buaya dan Kecamatan Teluk Kaiely.

Kecamatan Namlea terdiri dari Desa Namlea, Desa Lala, Desa Karang Jaya, Desa Siahoni, Desa Jamilu, Desa Sanleko dan Desa Batuboy. Kecamatan Waeapo terdiri dari Desa Savana Jaya, Desa Waetele, Desa waekasar, Desa Waenetat, Desa Waekarta, Desa Wanareja dan Desa Gogorea. Kecamatan Waplau terdiri dari Desa Lamahang, Desa Waeura, Desa Samalagi, Desa Namsina, Desa Hatawano, Desa Waelihang dan Desa Waprea. Kecamatan Air Buaya terdiri dari Desa Waepure, Desa Waemangit, Desa Air Buaya, Desa Tanjung Karang, Bara, Desa Wasbaka, Desa Batlale dan Desa Awilina. Kecamatan Teluk Kaiely terdiri dari Desa Keiely, Desa Masarete, Desa Waelapia, Desa Kaki Air dan Desa Seith.

Dengan adanya pemetaan daerah yang rawan pencurian dengan pemberatan, maka pihak Kepolisian menempatkan personilnya di daerah-daerah tersebut dengan jumlah 1 (satu) orang untuk tiap tempat. Jadi setiap personil yang telah ditugaskan di tempat yang telah ditentukan mempunyai tanggungjawab terhadap tempat bertugasnya. Personil-personil tersebut memberikan informasi kepada Kesatuan setiap perkembangan yang terjadi di wilayahnya.

b. Pre-emptif

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Adapun bentuk upaya Pre-emptif yakni dengan mengadakan penyuluhan. Selama ini pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak Lembaga Suadaya Masyarakat serta melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh agama dan penyuluhan-penyuluhan ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah dan tempat ibadah dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, agar menjadi masyarakat yang tertib dan taat hukum di Kabupaten Buru.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat menekan laju perkembangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru pada khususnya, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Buru, agar memiliki kesadaran hukum yang baik, sehingga tidak melakukan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan, karena bagaimanapun masyarakat yang kurang mendapatkan pemahaman yang baik tentang hukum akan mudah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya khususnya norma hukum, maka selama ini pihak Kepolisian Polres Pulau Buru telah melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum di berbagai tempat, agar masyarakat tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tercelah, atau kejahatan, khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

c. Preventif

Upaya pencegahan biasa juga disebut tindakan Preventif. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru, Upaya ini berupa :

1) Melakukan Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat

dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

Menurut AKP. Muhammad Harris, S.H., S.Ik. selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru (wawancara, 11 Februari 2013) menegaskan bahwa patroli di daerah-daerah yang rawan terjadinya suatu kejahatan, karena dengan adanya kegiatan patroli oleh petugas di lapangan, di harapkan dapat mencegah dan mengontrol terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru.

Lebih lanjut Kasat Reskrim Polres Pulau Buru mengatakan bahwa, walaupun wilayah hukum Polres Pulau Buru yang sangat luas dan jumlah personil yang minim itu tidak menjadi hambatan untuk melakukan patroli keliling agar memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat dan untuk meminimalisir terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya petugas melakukan patroli di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan, maka secara langsung seseorang akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, karena selalu ada petugas melakukan patroli di tempat tersebut.

2) Melakukan Ronda Malam

Selain mengadakan patroli keliling yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Buru, juga melakukan ronda malam di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya suatu kejahatan, dan bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini dimaksudkan agar dapat menekan terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru

d. Represif

Seiring pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif di lakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya ini baru diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Pulau Buru dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru antara lain adalah :

- 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- 2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara pencurian

dengan pemberatan di Kabupaten Buru dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dengan mengambil langkah-langkah seperti telah dikemukakan di atas, maka akan dapat mengoptimalkan tindakan koordinasi sehingga luas wilayah yang merupakan masalah selama ini akan dapat tertanggulangi dengan baik.

Untuk itu, tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupate Buru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian/pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Buru, disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, pendidikan yang rendah dan masyarakat yang lalai. Dari ketiga faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Buru adalah faktor ekonomi.
2. Penanggulangan yang dilakukan pihak Polres Pulau Buru dalam meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Buru yakni deteksi dini, Pre-emptif, preventif dan represif. Deteksi dini dilakukan dengan melakukan pemetaan daerah rawan sehingga kejahatan pencurian dengan pemberatan bisa ditanggulangi lebih awal. Upaya Pre-emptif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan. Upaya preventif dilakukan dengan mengadakan patroli dan ronda malam. Upaya

represif dilakukan dengan melakukan tindakan kepolisian yakni penangkapan, penahanan dan pelimpahan kasus ke Penuntut Umum (P-21).

B. Saran

Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Buru, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Agar Polres Pulau Buru menambah jumlah personil khususnya yang ditempatkan di beberapa Pos-pos Polisi sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan secara terpadu dan intensif apabila terjadi kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Buru di tempat - tempat yang dianggap rawan.
2. Polres Pulau Buru diharapkan dapat menambah jumlah sarana dan prasarana penunjang khususnya kendaraan dinas roda empat dan kendaraan roda dua sehingga dapat dilaksanakan patroli dengan baik sesuai kebutuhan di lapangan. Sehingga kasus-kasus kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan dapat diminimalisir dan dapat diproses sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Selain itu Polres Pulau Buru juga diharapkan agar dapat berkompeten mengenai masalah ini agar lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya-upaya penyuluhan di daerah-daerah yang dianggap rawan.